



Ministry of Energy and Mineral Resources
Republic of Indonesia

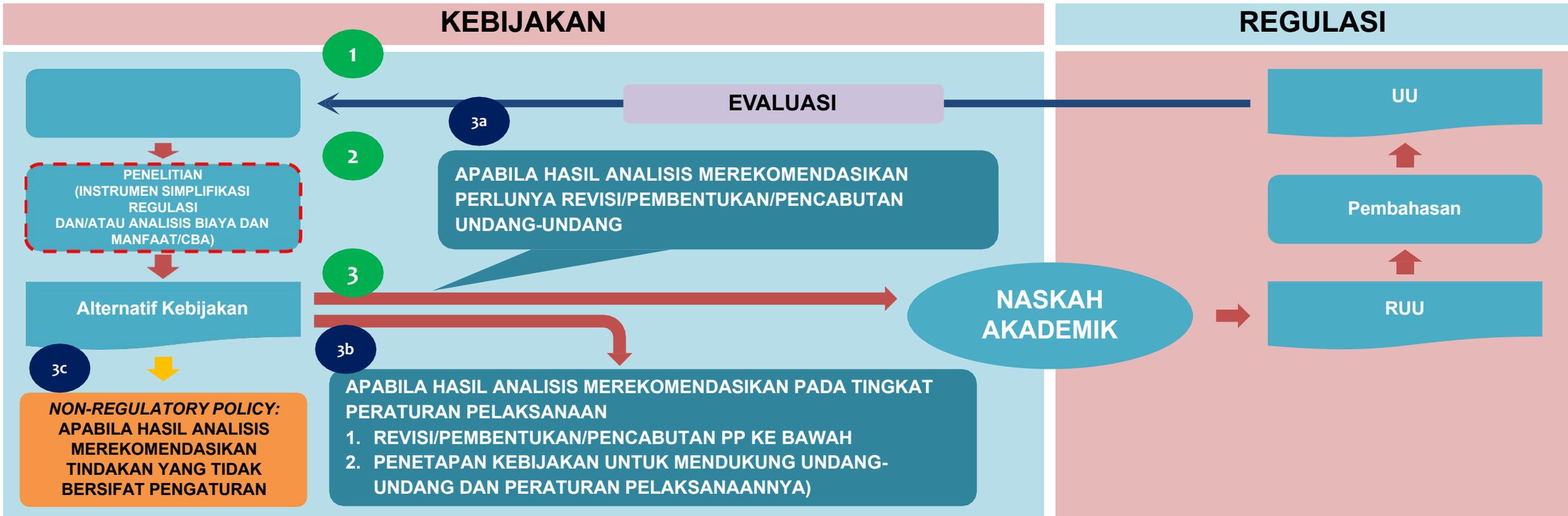
EVALUASI PROLEGNAS SEKTOR ESDM 2015-2019



Materi ini disampaikan oleh : Bambang Sujito (Kementerian ESDM)
Pada Acara : Diskusi Publik “Diskusi Publik Evaluasi Proyeksi
Prolegnas Sektor Energi dan Pertambangan”
Tanggal : 03 Desember 2019
Diselenggarakan oleh : Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)



Alur Pikir Sinergi Kebijakan dan Regulasi



PENGAJIAN: meliputi kegiatan (1) menemukan masalah mendasar; (2) penetapan tujuan/sasaran; dan (3) identifikasi regulasi yang sudah ada dan/atau terkait

PENELITIAN meliputi kegiatan analisis mendalam terhadap hasil pengkajian termasuk analisis biaya dan manfaat (CBA) dan/atau analisis terhadap regulasi yang ada. **3a.** Hasil penelitian bisa merekomendasikan revisi/pembentukan/pencabutan pada tingkat UU
3b. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasikan revisi/pembentukan/pencabutan UU namun bisa juga pada tingkat peraturan pelaksanaan
3c. *Non-regulatory policy* (kebijakan diluar peraturan): apabila hasil analisis merekomendasikan tindakan yang tidak bersifat pengaturan, misalnya ketidaktersediaan anggaran pelaksanaan dari regulasi, SDM pelaksana, dll.

Capaian Prolegnas Bidang ESDM Tahun 2015-2019

No.	Judul	Pengusul	Keterangan	Status
1	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR	Masuk Longlist Prolegnas dan Prolegnas Prioritas Tahun 2015 - 2019	Belum Selesai
2	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	Masuk Longlist Prolegnas dan Prolegnas Prioritas Tahun 2015 - 2019	Belum Selesai
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	DPR	Masuk Longlist Prolegnas, tetapi Tidak Masuk Prolegnas Prioritas	Belum Selesai
4	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR	Masuk Longlist Prolegnas dan Prolegnas Prioritas Tahun 2019	Belum Selesai
5	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	DPR	Masuk Longlist Prolegnas, tetapi Tidak Masuk Prolegnas Prioritas	Belum Selesai
6	RUU tentang Badan Geologi	DPR dan DPD	Masuk Longlist Prolegnas tetapi Tidak Masuk Prolegnas Prioritas	Belum Selesai
7	RUU tentang Sumber Daya Air (Oleh Kementerian PU)	DPR	Masuk Longlist Prolegnas dan Prolegnas Prioritas Tahun 2017 - 2019	Selesai (UU 17/2019)

Sumber: Prolegnas DPR 2015-2019



186 Perizinan Dicabut

Perizinan yang hambat investasi terus dipangkas

Penyederhanaan perizinan merupakan amanat dari Presiden untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan *multiplier effect* sebagai sarana pertumbuhan ekonomi dan akan menciptakan lapangan kerja yang luas



MIGAS

MINERBA

LISTRIK

EBTKE



#EnergiBerkeadilan | 7



www.esdm.go.id



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



@KementerianESDM



@kesdm



Kementerian ESDM

MINYAK DAN GAS BUMI

PENYEDERHANAAN 17 PERATURAN MESDM & 1 KEPUTUSAN MESDM SUB SEKTOR MIGAS

18

DICABUT

- Menghilangkan duplikasi sertifikasi
- Memangkas Birokrasi
- Penyederhanaan

Revisi:

1. Penyederhanaan tata kelola BBM dan LPG (Permen 13/2018 revisi/penggabungan Permen 16/2011 dan 26/2009)
2. Penyederhanaan Pengaturan Usaha Penunjang (Permen 14/2018 revisi Permen 27/2008)
3. Kepastian Hukum Kegiatan pasca operasi (Permen 15/2018 revisi Permen 11/2011)
4. Penyederhanaan Verifikasi Impor barang/masterlist (Permen 17/2018 revisi Permen 37/2006)
5. Penyederhanaan Prosedur Pemeriksaan Keselamatan melalui persetujuan layak operasi (Permen 18/2018 revisi 38/2017)

23

Sertifikasi/ Rekomendasi/ Perizinan DICABUT

- Rekomendasi Tenaga Kerja Asing (IMTA dan RPTKA)
- Menghapus surat keterangan penyalur BBM
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) perusahaan penunjang migas
- Proses persetujuan design dan persetujuan penggunaan peralatan migas (SKPP/SKPI) (cukup dengan persetujuan layak operasi)



KETENAGALISTRIKAN



www.esdm.go.id



Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral



@KementerianESDM



@kesdm



Kementerian ESDM

PENYEDERHANAAN 14 PERATURAN MESDM & 6 KEPUTUSAN MESDM SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

20

PERATURAN **DICABUT**

- *Memangkas Birokrasi (Memperlancar Dwelling Time Pemindahan inspeksi dari border ke postborder)*
- Standardisasi klasifikasi produk peralatan listrik
- Memperjelas pengklasifikasian produk peralatan tenaga listrik sehingga lebih mudah dalam pengawasan



MINERAL DAN BATUBARA



www.esdm.go.id



Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral



@KementerianESDM



@kesdm



Kementerian ESDM

PENYEDERHANAAN 19 PERATURAN MESDM, 11 KEPUTUSAN MESDM DAN 2 PERATURAN DIRJEN SUB SEKTOR MINERBA

32

PERATURAN DICABUT

- Menghilangkan duplikasi sertifikasi
- Memangkas Birokrasi
- Penyederhanaan tahapan kegiatan usaha
- Penyederhanaan dan efektifitas evaluasi melalui RKAB (satu kali setahun)
- Efektifitas pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan

Revisi:

1. Penyederhanaan Peraturan Menteri ESDM Terkait Substansi Kewilayahan, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (Peraturan Menteri ESDM No. 11/2018 revisi 5 Permen, 1 Kepmen, dan 2 Perdirjen).
2. Penyederhanaan Peraturan Menteri ESDM Terkait Substansi Pengusahaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Pengusahaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, revisi 11 permen)
3. Penyederhanaan Peraturan Menteri ESDM Terkait Substansi Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan (Rpermen Tentang Pelaksanaan Kaidah Teknis Pertambangan Dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, revisi 3 Permen dan 3 Kepmen)

64

Rekomendasi/ Perizinan DICABUT

- Penggunaan satu penjaminan reklamasi untuk seluruh kegiatan usaha pertambangan
- Sertifikasi tenaga teknik, CNC, Kelayakan Peralatan dan Instalasi
- Rekomendasi IPPKH
- Rekomendasi tenaga kerja asing
- Tanda registrasi
- Persetujuan laporan eksplorasi
- Surat Keterangan terdaftar



EBTKE



PENYEDERHANAAN 5 PERATURAN MESDM SUB SEKTOR EBTKE

5

PERATURAN DICABUT

- Penyelarasan harga beli listrik EBT
- Memangkas Rantai Birokrasi

Revisi:

Pencabutan permen ESDM terkait kegiatan dibidang EBTKE (Permen ESDM 9/2018 mencabut/merevisi 5 Permen: Permen 19/2015; Permen 19/2016; Permen 21/2016; Permen 14/2016; Permen 13/2012)

DICABUT

- Izin penggunaan gudang bahan peledak panas bumi
- Rekomendasi Pembelian dan penggunaan bahan peledak panas bumi
- Rekomendasi pemusnahan bahan peledak Panas Bumi
- Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)
- Rekomendasi izin mempergunakan tenaga kerja asing (IMTA)
- Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan dan Instalasi Panas Bumi
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Jasa Penunjang Panas Bumi



SKKMIGAS



PENYEDERHANAAN 12 PEDOMAN TATAKERJASKKMIGAS

12

PERATURAN DICABUT

1. PTK 008/2004 Pedoman Sistem Kewenangan Manajemen
2. PTK 021/2007 Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan BPMIGAS
3. PTK 023/2009 Pengusahaan Minyak Bumi Pada Sumur Tua
4. PTK 029/2009 Penunjukkan Penjual & Penjualan Gas Bagian Negara
5. PTK 027/2007 Pengadaan Tanah
6. PTK 042/2011 Pengelolaan Terminal Khusus/Terminal untuk kepentingan Sendiri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas
7. PTK 012/2007 Pengoperasian & Pemeliharaan Pipa Penyalur Migas
8. PTK 013/2007 Pengoperasian dan Pemeliharaan Tangki Penyimpanan Minyak Bumi
9. PTK 016/2007 Sistem Manajemen K3 KKKS
10. PTK 035/2006 Pengelolaan K3LL Kontraktor dan Sistem Manajemen K3
11. PTK 045/2011 Environmental Based Assessment
12. PTK 048/2012 Manajemen Krisis

Mempersingkat proses birokrasi:

1. Proses pengadanan tanah langsung
2. Surat Penunjukan penjual gas bagian negara (SAL) dan perjanjian penunjukan penjual migasnya dibuat satu kali saja berdasarkan WK
3. Mempermudah birokrasi dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi kehandalan fasilitas operasi hulu migas
4. Pengelolaan Tersus & TUKS cukup mengacu kepada peraturan yang sudah diterbitkan Pemerintah dalam bentuk PP maupun Permenhub
5. Mempermudah birokrasi pengawasan & monev pengelolaan K3LL hulu migas
6. Mempermudah birokrasi dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi kehandalan fasilitas operasi hulu migas

TERIMA KASIH



Materi ini disampaikan oleh : Bambang Sujito (Kemenyterian ESDM)
Pada Acara : Diskusi Publik “Diskusi Publik Evaluasi Proyeksi Prolegnas Sektor Energi dan Pertambangan”
Tanggal : 03 Desember 2019
Diselenggarakan oleh : Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)



POKOK PIKIRAN DALAM RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (RUU MINERBA)

- 1 Penyelesaian Permasalahan Antar Sektor
- 2 Penguatan Konsep Wilayah Pertambangan
- 3 Memperkuat Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah
- 4 Mendorong Kegiatan Eksplorasi untuk Penemuan Deposit Minerba
- 5 Pengaturan Khusus tentang Izin Pengusahaan Batuan
- 6 Mengakomodir Putusan MK dan UU No.23 Tahun 2014
- 7 Penguatan Peran Pemerintah dalam Binwas Kepada Pemda
- 8 Penguatan Peran BUMN
- 9 Perubahan KK/PKP2B menjadi IUPK
- 10 Isu Lain-Lain (Luas WPR, Konservasi, Iuran Pertambangan Rakyat)

 USULAN PEMERINTAH

 USULAN PEMERINTAH DAN DPR

RUU MINERBA MERUPAKAN RUU PRAKARSA DPR RI periode 2015-2019.

PRESIDEN RI telah menunjuk 5 Kementerian yang mewakili pembahasan DIM RUU yakni: KESDM (vocal point), Kemenkeu, Kemendagri, Kemenperin, dan Kemenkumham

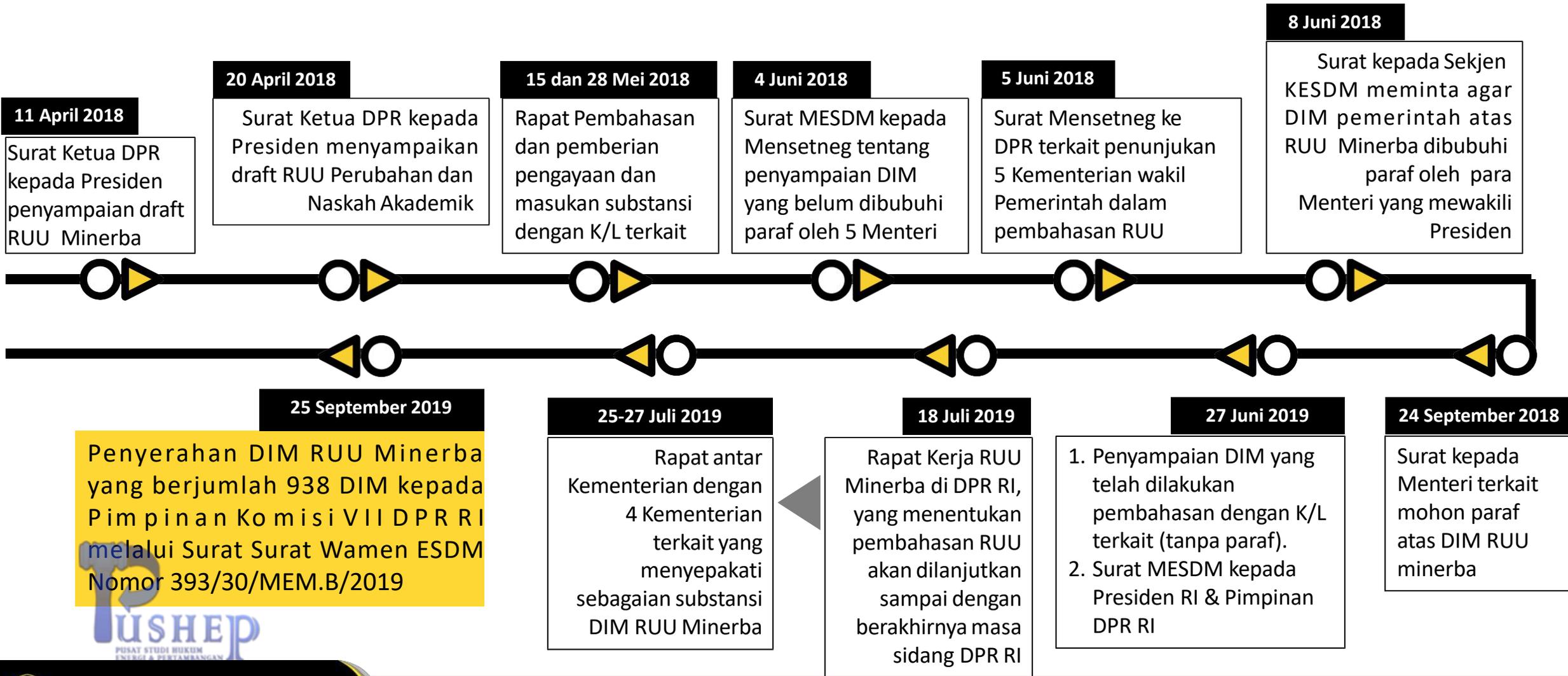


Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019:

*“Dalam hal pembahasan RUU telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan **disampaikan kepada DPR periode berikutnya....”***

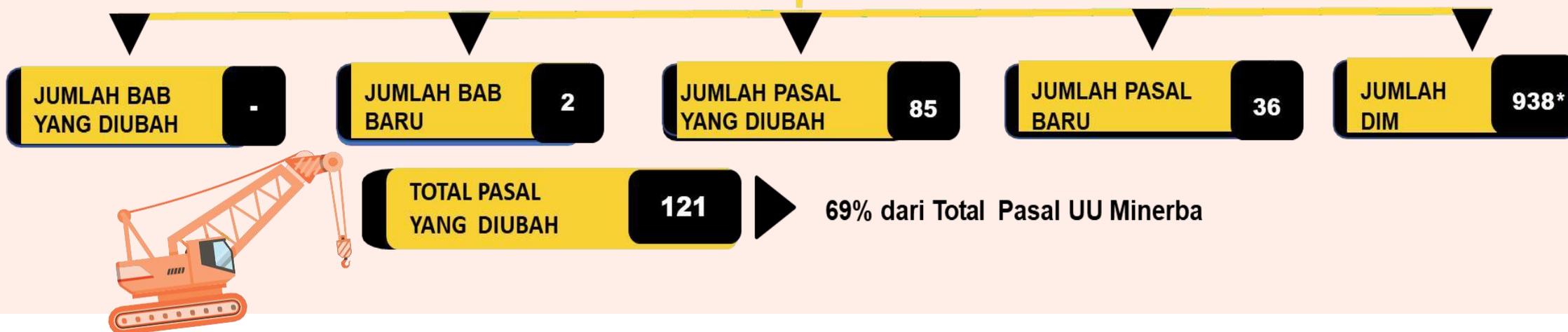


Kronologis dan Progress





Konsep DIM RUU Minerba usulan Pemerintah hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga terkait menghasilkan perubahan dengan data sebagai berikut:



Surat No.180/9709/SJ tgl 20 September 2019



SEPAKAT DAN TELAH PARAF

Surat No.S/685.1/MK.010/2019 tgl 18 September 2019



SEPAKAT DAN TELAH PARAF

Surat No.614/M-IND/IX/2019 tgl 19 September 2019



TELAH PARAF NAMUN BELUM SEPAKAT

Mengusulkan Penghapusan kegiatan pemurnian dalam kegiatan usaha pertambangan

Disampaikan tgl 20 September 2019



SEPAKAT DAN TELAH PARAF



Terima Kasih & Follow Kami



www.esdm.go.id



@KementerianESDM



Kementerian ESDM



@kesdm



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



@kementerian.esdm

Materi ini disampaikan oleh
Pada Acara

Tanggal
Diselenggarakan oleh

: Bambang Sujito (Kemenyterian ESDM)
: Diskusi Publik "Diskusi Publik Evaluasi Proyeksi
Prolegnas Sektor Energi dan Pertambangan"
: 03 Desember 2019
: Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)

